

## ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**Vidya Vitta Adhivinna**

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl PGRI I No. 117 sonosewu Yogyakarta

Email: [aprilvitta29@gmail.com](mailto:aprilvitta29@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bantul.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah, efisien, efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio pengelolaan belanja daerah. Penelitian ini digunakan alat analisis deskriptif dengan tolok ukur analisis kemandirian, efektivitas, efisien, pertumbuhan, dan pengelolaan belanja daerah.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Bantul dinilai masih rendah. Dari rasio efisiensi menunjukkan hasil yang sangat efisien selama 5 tahun dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan analisis rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang fluktuatif yang disebabkan peningkatan dan penurunan PAD. Dari hasil rasio efektivitas menunjukkan hasil Pemerintah Kabupaten Bantul dinilai sangat efektif dalam mengelola kekayaan daerah. Hasil dari analisis rasio pengelolaan belanja, terjadi peningkatan dan penurunan dari rasio pengelolaan belanja.

**Kata Kunci:** kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan pengelolaan belanja.

### Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, maka hubungan yang bersifat sentralistik diubah menjadi hubungan desentralistik. Maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002), salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintahan Daerah melalui APBD dilakukan menggunakan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan. Menurut Halim (2004) penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukuran. Menurut Landiyanto (2005), untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat juga menggunakan kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Bantul.

### Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Bantul. Penelitian ini dibatasi pada lima faktor yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, rasio pengelolaan belanja daerah, dan rasio efisiensi.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Peme-

rintah Daerah Kabupaten Bantul dalam membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

### Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah lain yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004) berdasarkan peraturan-peraturan manajemen keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik:

1. Pengertian daerah adalah propinsi dan kota atau kabupaten. Istilah Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, juga Kotamadya tidak lagi digunakan.
2. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatnya. Pemerintah ini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif di daerah adalah DPRD (pasal 14 UU No. 22 tahun 1999). Oleh karena itu terdapat pemisahan antara eksekutif dan legislatif.
3. Perhitungan APBD menjadi satu laporan dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah (pasal 5 PP No. 108 tahun 2000).

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
3. *Value for money* adalah mengandung arti menerapkan tiga prinsip dalam proses

penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

- a) Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu dengan harga terbaik.
- b) Efisiensi adalah suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
- c) Efektivitas adalah hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Bastian (2005:274) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial.
2. Analisis pengeluaran, yaitu selisih mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Analisis anggaran, yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut penjelasan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber PAD Kabupaten Bantul meliputi pajak daerah, antara lain: pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan retribusi pajak parkir, dan retribusi pelayanan daerah seperti; retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi terminal. Selain dari pajak dan retribusi daerah, pendapatan daerah juga bersumber dari laba perusahaan daerah. Kabupaten Bantul memiliki 3 perusahaan daerah, yaitu: PD. Bank Bantul, PD. Air Minum dan PD. Aneka Dharma.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

### **Rasio Keuangan**

Rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi kedalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Jenis-jenis Rasio Keuangan:

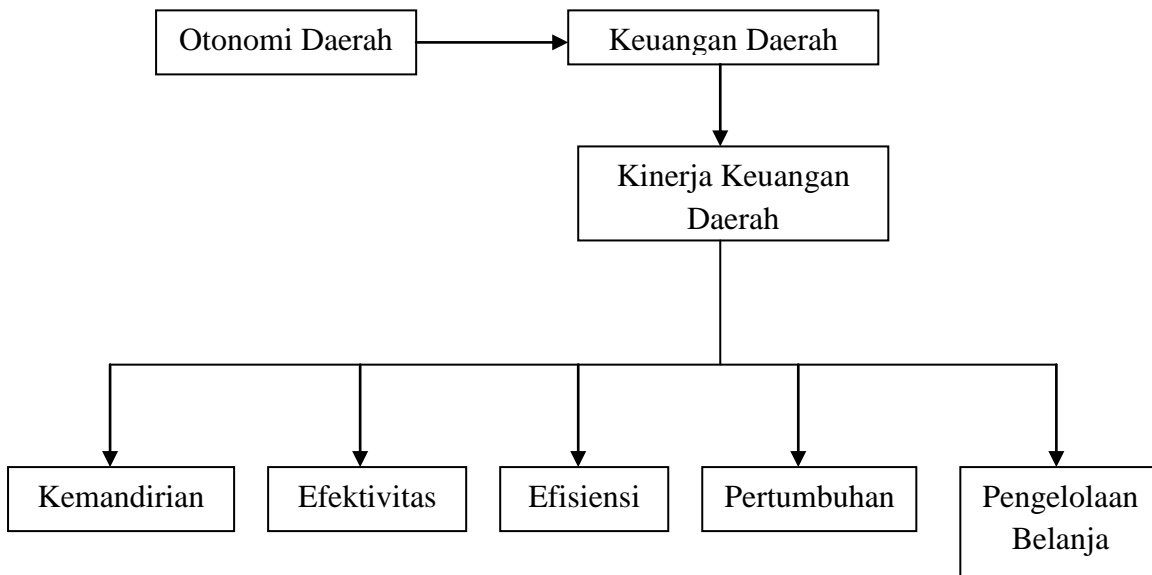
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Menurut Halim (2004) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah demikian sebaliknya.

2. Rasio Efektivitas  
Efektivitas menurut Mardiasmo (2002) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan seluruh penerimaan daerah terhadap potensi pendapatan daerah. Efektivitas untuk membantu menganalisa sejauh mana realisasi seluruh penerimaan daerah berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai suatu periode tertentu.
3. Rasio Efisiensi  
Rasio efisiensi menurut Halim (2004) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil risiko efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.
4. Rasio Pertumbuhan  
Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan

- meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2004).
5. Rasio Pengelolaan Belanja  
Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki entitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan (Wahyuni, 2007).

**Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio, yang dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

### Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Kemandirian Pemerintah Kabupaten Bantul mengalami perkembangan selama lima tahun (2008 – 2012).  
 H2: Efektivitas Pemerintah Kabupaten Bantul mengalami perkembangan selama lima tahun (2008 – 2012).  
 H3: Efisiensi Pemerintah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan selama lima tahun (2008 – 2012).  
 H4: Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan selama lima tahun (2008 - 2012).  
 H5: Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan selama lima tahun (2008 – 2012).

### Metode Penelitian

#### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dengan mengambil data sampel di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian=

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menurut Halim (2004), menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal yaitu pemerintah pusat semakin rendah.

**Tabel 1. Kriteria Kinerja Keuangan-Kemandirian**

No.	Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Kemampuan Daerah
1.	Rendah Sekali	0-25	Tidak mampu
2.	Rendah	25-50	Sedikit lebih mampu
3.	Sedang	50-75	Mampu
4.	Tinggi	75-100	Mampu dan Mandiri

#### 2. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan besarnya realisasi PAD dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas yang dikategorikan efektif jika efektivitas yang ingin dicapai minimal 100%.

**Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan-Efektivitas**

No.	Persentase	Kriteria
1.	> 100	Sangat Efektif
2.	90 - 100	Efektif
3.	80 - 90	Cukup Efektif
4.	60 - 80	Kurang Efektif
5.	< 60	Tidak Efektif

### 3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Pengukuran rasio efisiensi yaitu semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya semakin tinggi rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin rendah (Halim, 2004).

**Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan Efisiensi**

No.	Persentase	Kriteria
1.	> 100	Tidak Efisien
2.	90 - 100	Kurang Efisien
3.	80 - 90	Cukup Efisien
4.	60 - 80	Efisien
5.	< 60	Sangat Efisien

### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2004).

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}_{t_1} - \text{PAD}_{t_0}}{\text{PAD}_{t_0}}$$

Keterangan:  
 $t_0$  = tahun awal  
 $t_1$  = tahun akhir

**Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan–Pertumbuhan**

No.	Perkembangan	Kriteria	Kemampuan Keuangan
1.	Positif	Meningkat	Kinerja Pendapatan Meningkat
2.	Negatif	Menurun	Kinerja Pendapatan Menurun

Analisis rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan positif kecenderungannya meningkat, sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan.

### 5. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$$

### Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan mengambil data melalui studi pustaka, dengan tujuan mendapatkan gambaran dan sebagai landasan teori yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan (Sugiyono, 2004).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPEDA) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul dari tahun 2008 – 2012.

**Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul. Beberapa macam rasio keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi PAD, rasio pertumbuhan dan rasio pengelolaan belanja (Halim, 2004).

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bersumber dari data laporan keuangan APBD Kabupaten Bantul periode 2008 -2012. Analisis keuangan yang digunakan adalah alat analisis rasio yang diterapkan pada organisasi sektor publik.

**Hasil Penelitian**

**Data Keuangan**

Berikut data keuangan pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008-2012:

**Tabel 5. Data Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul**

No.	Keterangan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan	1.023.590.207.758,85	882.149.788.429,75	986.866.902.363,07	1.180.547.112.432,41	981.000.615.751,11
2	PAD	69.800.761.508,85	88.691.362.690,38	81.637.099.293,07	128.896.456.173,41	110.251.417.704,11
3	Dana Perimbangan	679.250.090.167,00	668.488.989.539,37	688.676.566.702,00	717.123.249.859,00	691.577.179.797,00
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	274.539.356.083,00	124.969.436.200,00	216.553.236.368,00	334.527.406.400,00	179.172.018.250,00
5	Belanja	1.045.423.303.527,78	903.767.000.429,01	1.012.356.847.235,49	1.151.885.952.327,97	736.080.631.432,48
6	Belanja Modal	302.760.365.899,00	107.353.190.571,00	123.249.280.474,00	119.417.030.209,00	30.864.322.733,00
7	Pembiayaan	106.609.461.054,02	82.661.134.608,83	60.597.961.933,31	30.992.516.384,63	51.527.482.321,81
8	Penerimaan Daerah	119.713.769.894,59	84.776.365.285,09	61.043.922.609,57	35.107.747.060,89	61.111.712.998,07
9	Pengeluaran Daerah	13.104.308.840,57	2.115.230.676,26	446.230.676,26	4.115.230.676,26	9.584.230.676,26

Sumber: Data Sekunder, diolah 2013

Dari tabel 5 diketahui bahwa total pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yang dipicu dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada pos belanja terdapat peningkatan belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan pada pos pembiayaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan kecuali tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu pembiayaan sebesar Rp. 51.527.482.321,81.

**Uji Hipotesis**

**1. Uji Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian menurut Halim (2004), menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal yaitu pemerintah pusat semakin rendah.

**Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul**

No	Tahun	Total Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio Kemandirian (%)	Perkembangan
1	2008	1.023.590.207.758,85	69.800.761.508,85	6,81	-
2	2009	882.149.788.429,75	88.691.362.690,38	10,05	Meningkat *
3	2010	986.866.902.363,07	81.637.099.293,07	8,27	Menurun *
4	2011	1.180.547.112.432,41	128.896.456.173,41	10,91	Meningkat *
5	2012	981.000.615.751,11	110.251.417.704,11	11,24	Meningkat *
Rata-rata Rasio Kemandirian				9,45	

Sumber: Data sekunder diolah 2013

Keterangan: \* : tidak mampu

Pada tabel 6 dapat diketahui rasio kemandirian Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- Pada tahun anggaran 2008 rasio kemandirian mencapai 6,81%, angka tersebut berada pada rentang kurang dari 25% sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan masih rendah sekali untuk kemandirian keuangan daerah.
- Pada tahun anggaran 2009 rasio kemandirian mencapai 10,05%, cenderung meningkat 3,24% dari tahun anggaran 2008. Hasil ini di dalam rentang kurang dari 25% sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan masih rendah untuk rasio kemandirian keuangan daerah.
- Pada tahun anggaran 2010 rasio kemandirian mencapai 8,27% atau menurun 1,78% dari tahun anggaran 2009. Angka rasio ini masih di dalam rentang kurang dari 25% sehingga dapat dikatakan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul masih rendah.
- Pada tahun anggaran 2011 rasio kemandirian mencapai 10,91% atau naik sebesar 2,64%. Angka rasio ini masih cukup rendah karena berada pada rentang kurang dari 25%.
- Pada tahun anggaran 2012 rasio kemandirian mencapai 11,24% atau naik sebesar 0,33%. Pada tahun anggaran 2012 ini angka rasio kemandirian juga berada pada rentang kurang dari 25% sehingga dapat dikatakan rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Bantul masih rendah.

Dari hasil uji kemandirian keuangan daerah atas laporan keuangan Kabupaten Bantul, maka dapat disimpulkan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bantul masih cukup rendah karena berada pada rentang kurang dari 25 %. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul masih bergantung pada bantuan pihak eksternal baik berupa bantuan dari pusat atau pinjaman.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal yaitu pemerintah pusat semakin rendah. Akan tetapi dari hasil data yang diolah dan dianalisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul masih rendah rasio kemandirian keuangan daerah, sehingga masih mengandalkan bantuan dana dari pihak eksternal.

## 2. Uji Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan besarnya realisasi PAD dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau seratus persen.



**Tabel 7. Rasio Efektivitas Kabupaten Bantul**

No.	Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas (%)	Perkembangan
1	2008	59.069.544.315,41	69.800.761.508,85	118,16%	Sangat Efektif
2	2009	77.286.936.022,99	88.691.362.690,38	114,75%	Sangat Efektif
3	2010	89.015.027.964,59	81.637.099.293,07	91,71%	Efektif
4	2011	115.321.898.743,75	128.896.456.173,41	111,77%	Sangat Efektif
5	2012	141.624.239.103,47	110.251.417.704,11	77,85%	Kurang Efektif
Rata-rata Rasio Efektivitas				102,85%	

Sumber: Data sekunder diolah 2013

Dari hasil data yang diolah, maka perbandingan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul cukup baik karena realisasi PAD rata-rata diatas seratus persen yaitu sebesar 102,85%.

Dimana pada tahun 2008 rasio efektivitas mengalami perkembangan yang sangat efektif dengan rasio sebesar 118,16%. Pada tahun 2009 rasio efektivitas juga sangat efektif dengan hasil sebesar 114,75%. Akan tetapi pada tahun 2010 rasio efektivitas memperlihatkan rasio yang efektif dengan hasil sebesar 91,71%, mengalami penurunan dibanding tahun 2009. Pada tahun 2011 meningkat yaitu dengan rasio sebesar 111,77%, sehingga rasio efektivitas dapat dikatakan sangat efektif. Tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan rasio sebesar 77,85%, sehingga rasio efektivitas dikatakan kurang efektif.

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Bantul

tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012 penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2008 – 2009 sebesar 3,41% (118,16% - 114,75%). Tahun 2009 – 2010 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 23,04% (114,75% - 91,71%). Kemudian pada tahun 2010 – 2011 mengalami peningkatan yaitu sebesar 20,06% (111,77% - 91,71%). Sedangkan pada tahun 2011 – 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 33,92% (111,77% - 77,85%).

### 3. Uji Efisiensi PAD

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya semakin tinggi rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin rendah (Halim, 2004).

**Tabel 8. Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul**

No	Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi (%)	Perkembangan
1	2008	1.822.216.600,00	69.800.761.508,85	2,61%	Sangat Efisien
2	2009	3.962.829.300,00	88.691.362.690,38	4,47%	Sangat Efisien
3	2010	1.776.309.327,00	81.637.099.293,07	2,17%	Sangat Efisien
4	2011	1.906.274.600,00	128.896.456.173,41	1,48%	Sangat Efisien
5	2012	1.026.300.500,00	110.251.417.704,11	0,93%	Sangat Efisien
Rata-rata Rasio Efisiensi				2,33%	

Sumber: Data sekunder diolah 2013

Dari hasil tabel 8 dapat dilihat besarnya rasio efisiensi PAD pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan hasil yang Sangat Efisien, karena berada pada rentang kurang dari 60%, dengan hasil rata-rata rasio efisiensi sebesar 2.33%. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Bantul sangat efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengelola sumber-sumber PAD.

Pada tahun 2008 rasio efisiensi menunjukkan hasil sebesar 2,61% berarti sangat efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengelola sumber-sumber PAD. Hal ini disebabkan karena biaya pemungutan PAD yang kecil yaitu sebesar Rp. 1.822.216.600,00 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD yang sebesar Rp. 69.800.761.508,58.

Tahun 2009 rasio efisiensi menunjukkan hasil sebesar 4,47% berarti Pemerintah Kabupaten Bantul sangat efisien dalam mengeluarkan biaya dalam mengelola sumber-sumber PAD. Dimana biaya pemungutan PAD lebih kecil yaitu sebesar Rp. 3.962.829.300,00 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 88.691.362.690,38. Kenaikan angka rasio dari tahun 2008 sebesar 2,61% menjadi 4,47% pada tahun 2009 disebabkan karena peningkatan PAD.

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi penurunan rasio efisiensi, akan tetapi masih dapat dikatakan rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Bantul sangat efisien dalam mengelola sumber-sumber PAD karena hasil rasio yang kecil. Pada tahun 2010 rasio efisiensi sebesar

2,17%, hasil ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Hal ini disebabkan penurunan penerimaan PAD dari tahun 2009 sebesar Rp. 88.691.362.690,38 menjadi hanya sebesar Rp. 81.637.099.293,07 pada tahun 2010. Tahun 2011 terjadi penurunan rasio efisiensi yaitu sebesar 1,48%. Walaupun penerimaan PAD meningkat yaitu sebesar Rp. 128.896.456.173,41 tetapi biaya pemungutan PAD juga meningkat yaitu sebesar Rp. 1.906.274.600,00, sehingga mengakibatkan rasio efisiensi menurun. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 juga mengalami penurunan rasio efisiensi yaitu rasio menunjukkan angka 0,93%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 penurunan biaya pemungutan PAD akan tetapi diikuti juga dengan penurunan penerimaan PAD. Sehingga mengakibatkan penurunan rasio efisiensi, tetapi hasil tersebut masih di dalam rentang yang sangat efektif.

#### 4. Uji Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2004). Berikut hasil perhitungan analisis rasio pertumbuhan Kabupaten Bantul:

**Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Bantul**

No	Tahun	PAD <sub>t<sub>0</sub></sub>	PAD <sub>t<sub>1</sub></sub>	Rasio Pertumbuhan (%)	Kemampuan Keuangan
1	2008 – 2009	69.800.761.508,85	88.691.362.690,38	27,06%	-
2	2009 - 2010	88.691.362.690,38	81.637.099.293,07	(7,95%)	Kinerja Pendapatan Menurun
3	2010 - 2011	81.637.099.293,07	128.896.456.173,41	57,88%	Kinerja Pendapatan Meningkat
4	2011 - 2012	128.896.456.173,41	110.251.417.704,11	(14,46%)	Kinerja Pendapatan Menurun
Rata-rata Rasio Pertumbuhan				12.50%	

Sumber: Data sekunder diolah 2013

Dari tabel 9 dapat dijelaskan pertumbuhan PAD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2008–2009 mencapai 27,06%. Kemudian pada tahun 2009–2010 angka pertumbuhan PAD menurun menjadi -7,95%, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2009 mengalami penurunan PAD yang semula Rp. 88.691.362.690,38 menjadi Rp. 81.637.099.293,07, sehingga mempengaruhi rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2010-2011, pertumbuhan PAD Kabupaten Bantul meningkat sebesar 57,88%. Peningkatan pertumbuhan PAD ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari tahun 2010–2011 yaitu sebesar Rp. 81.637.099.293,07 menjadi Rp. 128.896.456.173,41.

Kemudian pada tahun 2011 – 2012 terjadi penurunan rasio pertumbuhan yaitu menjadi sebesar -14,46%. Hal ini disebabkan penurunan PAD pada tahun 2011 sebesar Rp. 128.896.456.173,41 menjadi Rp. 110.251.417.704,11 pada tahun 2012.

### 5. Uji Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Berikut hasil perhitungan analisis rasio pengelolaan belanja Kabupaten Bantul:

**Tabel 10. Laporan Surplus/Defisit Anggaran Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 – 2012**

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2008	1.023.590.207.758,85	1.045.423.303.527,78	(21.833.095.768,93)
2009	882.149.788.429,75	903.767.000.429,01	(21.617.211.999,26)
2010	986.866.902.363,07	1.012.356.847.235,49	(25.489.944.872,42)
2011	1.180.547.112.432,41	1.151.885.952.327,97	28.661.160.104,44
2012	981.000.615.751,11	736.080.631.432,48	244.919.984.318,63

Sumber: Data sekunder diolah 2013

Rasio Pengelolaan Belanja Kabupaten Bantul:

- Tahun 2008 =  $\frac{1.023.590.207.758,85}{1.045.423.303.527,78} \times 100 = 97,91\%$
- Tahun 2009 =  $\frac{882.149.788.429,75}{903.767.000.429,01} \times 100 = 97,60\%$
- Tahun 2010 =  $\frac{986.866.902.363,07}{1.012.356.847.235,49} \times 100 = 97,48\%$
- Tahun 2011 =  $\frac{1.180.547.112.432,41}{1.151.885.952.327,97} \times 100 = 102,48\%$

- Tahun 2012 =  $\frac{981.000.615.751,11}{736.080.631.432,48} \times 100 = 133,27\%$

Dari perhitungan rasio pengelolaan belanja diatas dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan belanja yang paling baik adalah pada tahun 2011 dan 2012 yaitu diatas 100% sebesar 102,48% pada tahun 2011 dan sebesar 133,27% pada tahun 2012. Pada tahun 2011 menunjukkan adanya surplus sebesar Rp. 28.661.160.104,44 dan surplus sebesar Rp. 244.919.984.318,63 tahun 2012. Peningkatan/surplus ini disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2011 dan 2012. Peningkatan pendapatan

tersebut disertai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menekan realisasi belanja.

Sedangkan pada rentang tahun 2008, 2009, dan 2010 kinerja pengelolaan belanja mengalami defisit, yaitu sebesar Rp. 21.833.095.768,93 pada tahun 2008, Rp. 21.617.211.999,26 pada tahun 2009, dan defisit Rp. 25.489.944.872,42 pada tahun 2010. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bantul gagal menekan realisasi

belanja, sehingga menyebabkan kinerja pengelolaan belanja menjadi defisit.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul berdasarkan analisis rasio dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 11. Perhitungan Rasio**

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Rasio Kemandirian	6,81%	10,05%*	(8,27%)	10,91%*	11,24%*	9,45%
2	Rasio Efektivitas	118,16%	(114,75%)	(91,71%)	111,77%*	(77,85%)	102,85%
3	Rasio Efisiensi	2,61%	4,47%*	(2,17%)	(1,48%)	(0,93%)	2,33%
4	Rasio Pertumbuhan	-	27,06%	(7,95%)	57,88%*	(14,46%)	12,50%
5	Rasio Pengelolaan Belanja	97,91%	(97,60%)	(97,48%)	102,48*	133,27*	69,29%

Sumber: Data sekunder diolah 2013

Keterangan: ( ) : Menurun

\* : Naik

Dari tabel 10, dapat dilihat Rasio Kemandirian pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 Pemerintah Kabupaten Bantul dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase rasio kemandirian dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 masih sangat rendah, yaitu sebesar 9,45% dimana rata-rata tersebut masih dibawah angka 25%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Bantul masih sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil rasio kemandirian disebabkan Pemerintah Kabupaten Bantul masih sangat bergantung pada bantuan pihak eksternal jika dibandingkan dengan PAD yang diperoleh.

Untuk penilaian kinerja efektivitas pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai kinerja yang efektif. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata

rasio efektivitas yang baik selama 5 tahun yaitu sebesar 102,85%. Hasil ini dinilai sangat efektif karena selama 5 tahun rasio efektivitas menunjukkan hasil diatas 100%, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil dengan efektif dalam mengelola kekayaan daerah. Walaupun pada beberapa tahun sempat mengalami penurunan akan tetapi hasilnya masih diatas rata-rata 100%. Misalnya pada tahun 2008 rasio efektivitas menunjukkan hasil sebesar 118,16% kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 114,75%. Akan tetapi hasil tersebut dapat dikatakan masih dalam rentang yang sangat efektif karena masih diatas 100%. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 91,71%, tetapi hasil ini menunjukkan nilai yang masih efektif. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi sebesar 111,77%, yang dinilai sangat efektif karena berada pada

rentang diatas 100%. Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 77,85%, hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bantul kurang efektif dalam mengelola kekayaan daerah, karena realisasi penerimaan PAD lebih kecil daripada target penerimaan PAD.

Hasil dari rasio efisiensi dari tahun 2008 sampai dengan 2012 rata-rata menunjukkan hasil yang sangat efisien karena berada pada rentang kurang dari 60%, yaitu rata-rata sebesar 2,33%. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bantul sangat efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, karena biaya yang digunakan untuk memungut PAD lebih kecil daripada realisasi penerimaan PAD.

Untuk hasil rasio pertumbuhan selama tahun 2008 sampai 2012 dengan hasil rata-rata sebesar 12,50%. Dari tahun 2009 sampai dengan 2010 menunjukkan kinerja pendapatan yang menurun yaitu dari 27,06% menjadi 7,95%. Hal ini karena terjadi penurunan PAD pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 81.637.099.293,07 menjadi Rp. 88.691.362.690,38 pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 7,95% menjadi 57,88%, hal ini karena kenaikan PAD dari tahun 2010 sebesar Rp. 81.637.099.293,07 menjadi sebesar Rp. 128.896.456.173,41 pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2012 terjadi penurunan dari 57,88% menjadi 14,46%. Kondisi ini terjadi karena PAD tahun 2012 mengalami penurunan Rp. 110.251.417.704,11 dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 128.896.456.173,41.

Dari analisis rasio pengelolaan belanja, menunjukkan rata-rata sebesar 69,29%. Perhitungan rasio pengelolaan belanja dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan belanja yang paling baik adalah pada tahun 2011 dan 2012 yaitu diatas 100% sebesar 102,48% pada tahun 2011 dan sebesar 133,27% pada tahun 2012. Pada tahun 2011 menunjukkan adanya surplus sebesar Rp. 28.661.160.104,44 dan surplus sebesar Rp. 244.919.984.318,63 tahun 2012. Peningkatan/surplus ini disebabkan karena

meningkatnya realisasi atas pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2011 dan 2012. Peningkatan pendapatan tersebut disertai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menekan realisasi belanja. Sedangkan pada rentang tahun 2008, 2009, dan 2010 kinerja pengelolaan belanja mengalami defisit, yaitu sebesar Rp. 21.833.095.768,93 pada tahun 2008, Rp. 21.617.211.999,26 pada tahun 2009, dan defisit Rp. 25.489.944.872,42 pada tahun 2010. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bantul gagal menekan realisasi belanja, sehingga menyebabkan kinerja pengelolaan belanja menjadi defisit.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul menggunakan analisis rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan rasio kemandirian, selama 5 tahun menunjukkan hasil yang kurang mandiri karena rata-rata hanya 9,45%. Hasil ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum mampu mandiri dan masih sangat bergantung pada bantuan pihak eksternal jika dibandingkan dengan PAD yang diperoleh.

Berdasarkan rasio efektivitas selama 5 tahun menunjukkan hasil rata-rata 102,85% yaitu diatas 100% yang berarti Pemerintah Kabupaten Bantul dinilai sangat efektif dalam mengelola kekayaan daerah. Walaupun pada tahun 2009, 2010, dan 2012 mengalami penurunan akan tetapi hasil analisis menunjukkan secara keseluruhan selama 5 tahun sangat efektif.

Dari rasio efisiensi menunjukkan hasil yang sangat efisien selama 5 tahun, karena rata-rata sebesar 2,33% lebih kecil dari 60%. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bantul sangat efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, karena biaya yang digunakan untuk memungut PAD lebih kecil daripada realisasi penerimaan PAD.

Hasil rasio pertumbuhan selama 5 tahun rata-rata sebesar 12,50%. Dari tahun

2009 sampai dengan 2010 menunjukkan kinerja pendapatan yang menurun yaitu dari 27,06% menjadi 7,95%. Hal ini karena terjadi penurunan PAD pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 81.637.099.293,07 menjadi Rp. 88.691.362.690,38 pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 7,95% menjadi 57,88%, hal ini karena kenaikan PAD dari tahun 2010 sebesar Rp. 81.637.099.293,07 menjadi sebesar Rp. 128.896.456.173,41 pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2012 terjadi penurunan dari 57,88% menjadi 14,46%. Kondisi ini terjadi karena PAD tahun 2012 mengalami penurunan Rp. 110.251.417.704,11 dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 128.896.456.173,41. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang fluktuatif yang disebabkan peningkatan dan penurunan PAD.

Berdasarkan rasio pengelolaan belanja menunjukkan hasil rata-rata selama 5 tahun yaitu sebesar 69,29%. Terjadi peningkatan dan penurunan dari rasio pengelolaan belanja. Peningkatan/surplus ini disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2011 dan 2012. Peningkatan pendapatan tersebut disertai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menekan realisasi belanja. Sedangkan pada rentang tahun 2008, 2009, dan 2010 kinerja pengelolaan belanja mengalami defisit. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bantul gagal menekan realisasi belanja, sehingga menyebabkan kinerja pengelolaan belanja menjadi defisit.

### Saran

Berdasarkan permasalahan, hasil analisis rasio, dan uji hipotesis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul serta kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul, antara lain adalah:

- 1 Pemerintah Kabupaten Bantul harus mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan bantuan dari pihak eksternal dengan cara mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD yang sudah ada maupun yang belum diolah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD.
- 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan memperluas lapangan pekerjaan di daerah Kabupaten Bantul agar pendapatan masyarakat Kabupaten Bantul meningkat sehingga dapat meningkatkan retribusi dan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
- 3 Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul sehingga dapat menarik investor agar menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Bantul.
- 4 Informasi dari analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja sebagai kepentingan manajemen birokrasi pemerintahan serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.

### Daftar Pustaka

- Azhar, MHD Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis, 46-47. Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Chandra, D.A. (2009). *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2004-2007*. Forum Penelitian, 1 (1): 1-6.

- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Penerbit PT. Indeks.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Landiyanto. 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah*. Di download dari <http://www.google.com>, diakses 3 Maret 2013.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2002. "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah."
- Nanik, Wahyuni. 2007. Skripsi, *Analisa Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. 2-4. Malang: UIN Maliki Malang.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sulastinah, Tati. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas PGRI.